

DOKUMEN

RENCANA KERJA
(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2024



DINAS PERINDUSTRIAN DAN
KETENAGAKERJAAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 ..8	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Gambaran Umum Capaian Program Prioritas yang dilaksanakan	9
2.2.1. Bidang Perindustrian	9
2.2.2. Bidang Ketenagakerjaan	12
2.2.3. Faktor- faktor penyebab (tidak memenuhi/memenuhi/melebihi)	18
2.2.4. Implikasi yang timbul terhadap capaian Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	18
2.2.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu juga untuk dilaksanakan oleh Pemerintah dalam untuk mengatasi faktor-faktor penyebab yang timbul	19
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	26
3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	26
3.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021- 2026	26

3.1.2. Telaahan Kementerian Pan RB.....	27
3.1.3. Telaahan Resnra Kementerian Perindustrian	29
3.1.4. Telaahan Renstra Perindustrian Provinsi.....	30
3.1.5. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	32
3.1.6. Telaahan Renstra Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	33
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	36
3.2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	36
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	46
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan	46
4.1.1 Bidang Perindustrian :	46
4.1.2 Bidang ketenagakerjaan	47
4.1.3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daeah	48
4.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif	48
BAB V PENUTUP.....	49
5.1. CATATAN PENTING.....	49
5.2. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN	49
5.3. RENCANA TINDAK LANJUT	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan Visi, Misi, (RKPD, RPJMD dan Renstra Pemerintah Daerah) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2021, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya.

5. Pendekatan Bottom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top-Down dan Bottom-Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2024 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II .
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2026
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai acuan/dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah:

1. Menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.
3. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.
4. Dan dapat bermanfaat demi perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan di masa akan yang datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

IV. PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting
- 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisis kinerja akan dilakukan terhadap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Pencapaian sasaran terhadap penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah mencakup sasaran dalam rencana strategis sesuai misi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Lingkup Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah :

1. Berkurangnya penduduk miskin.
2. Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa).
3. Meningkatnya daya saing dan produktivitas ekonomi kerakyatan
4. Perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial
5. Pelatihan Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja

2.2. Gambaran Umum Capaian Program Prioritas yang dilaksanakan

Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat dilihat pada evaluasi kinerja Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Program Bidang Perindustrian dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu, Tenaga Kerja untuk Program Bidang Ketenagakerjaan sedangkan Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dievaluasi dimasing- masing perangkat daerah sebelum terbentuknya Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Adapun pencapaian kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :.

2.2.1. Bidang Perindustrian

1) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk realisasi program/ kegiatan tidak ada yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan

2) Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berikut adalah program dan kegiatan yang memenuhi target dan realisasi yang diharapkan pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Tabel Capaian Kinerja yang memenuhi Target

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Pagu	Realisasi	%	Target Kinerja	Realisasi Fisik	Ket
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga	776.331.000	744.002.200	95,84	12%		
	Keg.Penyusunan,penerapan dan Evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten selayar	Jumlah IKM yang dikembangkan dan dievaluasi	776.331.000	744.002.200		55 IKM		
	SubKeg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			95,84			
	SubKeg.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksana Pembangunan Sumber Daya Industri							
	SbKeg.Koordinasi, Sinronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat.							
	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan							

Tabel 2.2 Tabel Capaian Kinerja yang memenuhi Target

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Pagu	Realisasi	%	Target Kinerja	Realisasi Fisik	Ket
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) (%)	8.155.773.000	8.030.867.684	98,47	20%		
	Keg. Penyediaan informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Izin Rekomendasi Industri yang dikeluarkan	8.155.773.000	8.030.867.684	98,47	4 Izin		
	Subkeg.Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain lingkup Kabupaten / Kota Melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.720.161.000	1.637.858.200	95,22	1 Dokumen		
	Subkeg.Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	6.435.612.000	6.393.009.484	99,34	1 Dokumen		

3) Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target dan memenuhi kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk realisasi program/ kegiatan tidak ada yang memenuhi target dan melebihi hasil/keluaran yang direncanakan

2.2.2. Bidang Ketenagakerjaan

1) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja terhadap renstra tahun 2021-2026 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target.

2) Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

B. Program Kerja Bidang Ketenagakerjaan

Berikut adalah program dan kegiatan yang memenuhi target dan realisasi yang diharapkan pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3. Capaian Kinerja yang memenuhi Target

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Pagu	Realisasi	%	Target Realisasi Fisik	Realisasi fisik	Ket
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (%)	587.944.000,-	587.825.180		19,84	39,06	Ya
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja						
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	25.834.000,-	25.735.180,-		2 layanan	2 layanan	Ya

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Pagu	Realisasi	%	Target Realisasi Fisik	Realisasi fisik	Ket
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AK	12.110.000,-	12.090.000,-		50 Orang	256 Orang	Ya
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	550.000.000	550.000.000	100	N/A	100 orang	Tidak ada data target

Tabel. 2.4.Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan yang memenuhi target Kinerja

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Pagu	Realisasi	%	Target Realisasi Fisik	Capaian Realisasi Fisik	Ket.
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)				0,4	2,28	Ya
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja %				44,29	98	Ya
	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Rp. 21.230.000	Rp. 21.230.000	100	5 perusahaan	5 perusahaan	Ya
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Rp. 21.230.000	Rp. 21.230.000	100	5 perusahaan	5 perusahaan	Ya
2.	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang layak (%)				0,60	n/a	Ya
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi/FGD tata cara pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang terlaksan	Rp,1.035.120.000	Rp.1.034.745.000	99,96	2 kali Program (42.456 Orang)	2 kali Program (42.456 Orang)	Ya
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Rp,1.035.120.000	Rp.1.034.745.000	99,96	2 kali Program (42.456 Orang)	2 kali Program (42.456 Orang)	Ya

Berdasarkan tabel 2.2. diketahui bahwa terdapat 2 kegiatan yang memenuhi target kinerja yakni : Pertama, kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil pada satu sub kegiatan *Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil*. Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 21.230.0000,- terealisasi sebesar Rp. 21.230.0000,- dengan capaian persentase sebesar 100 %. Terdapat target kinerja 5 Perusahaan dan teralisasi sebanyak 5 perusahaan. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan. Kedua Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan *Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*. Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 1.035.120.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.034.745.000,- dengan capaian persentase sebesar 99,96 %. Terdapat target kinerja 2 kali program kegiatan dan teralisasi sebanyak 2 kali program. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan

3). Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun terdapat Program/Kegiatan yang realisasi kinerjanya melebihi target yang ditentukan namun tidak melebihi reliasasi anggaran yang disediakan. Berikut dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini

Tabel 2.5. Realisasi Program dan Kegiatan yang memenuhi dan melebihi target kinerja

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Pagu	Realisasi	%	Target Realisasi Fisik	Realisa Fisik	%
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)				0,4	2,28	Ya
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)				44,29	98	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan yang terlaksana dan bersertifikat kompetensi	Rp, 131.526.069,-	Rp. 131.382.069,-	99,89	10 Pelatihan	21 Pelatihan	Ya
	Subkegiatan Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Rp.38.056.069	Rp.37.916.069,	99,63	30 Orang	30 Orang	
	Subkegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun n	Rp.93.470.000,	Rp.93.466.000	100	Lembaga	1 Lembaga (18 orang Alumni Mendapatkan Bantuan)	

Berdasarkan tabel diatas untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja secara keseluruhan realisasi kinerjanya sudah melebihi target yang telah ditentukan. Begitupun juga dengan kegiatan pada program tersebut yakni *Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi*. Berdasarkan Subkegiatannya maka realisasi kegiatan 2 kali lipat dari target yang ditentukan yakni 21 pelatih dari 10 pelatihan.

2.2.3. Faktor-faktor penyebab (tidak memenuhi/memenuhi/melebihi)

Berdasarkan Capaian kinerja 2.2.2. diatas, diketahui bahwa urusan pemerintahan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan untuk target dan realisasi keuangan semuanya diatas 95 %.

Kemudian berdasarkan tabel 2.3 untuk realisasi keuangannya diatas 95 %. yaitu program penempatan penempatan tenaga kerja . Lalu berdasarkan tabel 2.5 terdapat pula capaian kinerja diatas target yang diharapkan yakni program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, *kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi* .Ini disebabkan karena antusiasme pencari kerja karena dampak pandemi covid.

2.2.4. Implikasi yang timbul terhadap capaian Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Terjaganya Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 4) Meningkatnya keberdayaan masyarakat menjadi pelaku usaha
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai pelatihan/bimtek pengelolaan usaha *home industry*
- 6) Meningkatkan keberdayaan dan daya serap tenaga kerja

2.2.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu juga untuk dilaksanakan oleh Pemerintah dalam untuk mengatasi faktor-faktor penyebab yang timbul

2.2.5.1. Bidang Perindustrian

1. Memfasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri
2. Memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan daerah/nasional, BUMN, BUMD dan instansi terkait permodalan usaha.
3. Melakukan pendampingan manajemen kewirausahaan bagi calon wirausaha baru agar dapat memiliki mental yang tanggung dalam memulai usaha.
4. Melakukan pemutakhiran data perkembangan sektor industri melalui pendekatan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat menyajikan data secara real time dan valid sesuai dengan kebutuhan informasi data.
5. Melatih petugas pendataan industri yang disiapkan untuk kabupaten/kota serta memaksimalkan fungsi

pendamping dalam melakukan pendampingan kepada sentra-sentra yang *vacum* atau berhenti untuk difasilitasi jalan keluar dari kelangsungan produksi dan usaha IKM baik dalam bentuk modal maupun peralatan.

2.5.5.2. Bidang Ketenagakerjaan

1. Perlu dibentuk kegiatan yang menghubungkan antara calon tenaga kerja dengan pemberi kerja/perusahaan. Pengkoordinasian pelaksanaan dilakukan dengan cara penyampaian informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan setiap minggunya.
2. Tetap melakukan penyuluhan dan pelatihan kerja guna meningkatkan keterampilan dan keahlian calon tenaga kerja.
3. Perlu dibentuk lembaga pengendalian yang dilakukan melalui lembaga yang berbadan khusus untuk mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan s/d Tahun berjalan Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam lampiran 2

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Pelayanan perangkat daerah berisikan indikator yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Adapun capaian ini mengidentifikasi semua indikator perangkat daerah didasarkan pada indikator pada

RPJMN, Renstra K/L, IKK, SPM, NSPK, SDGs dan indikator program RPJMD 2021-2026 yang belum tercapai.

Adapun Bidang Perindustrian pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu kepada Misi ke- 4 Pembangunan Daerah yakni mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman. Adapun sasarannya untuk meningkatkan usaha pariwisata

Untuk Bidang Ketenagakerjaan Pelaksanaan Program dan Kegiatannya mengacu kepada Misi Ke 2 Pembangunan Daerah yakni Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan. Tujuannya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat .Adapun sasarannya mengarah kepada Sasaran Ketiga: Meningkatkan kapasitas SDM dan Fasilitas Perekomian Perdesaan.

Adapun Capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada Indikator Kinerja Kunci Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan dapat dilihat pada lampiran 3

2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat dimulai dari sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta hal-hal kritis yang menyangkut pelayanan perangkat daerah. Berkaitan dengan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, peran dan posisi Dinas Perindustrian dan

Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan Pemerintah Daerah dalam Lingkup Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu ditingkatkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat.

Selain itu dukungan dana yang proporsional dan memadai sangat dibutuhkan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kepastian regulasi dan aspek hukum baik dalam ranah kebijakan maupun operasional teknis juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kinerja tidak terkendala. Pada ranah kebijakan, perumusan integrasi pembinaan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan inovasi upaya strategis mewujudkan tupoksi dengan lebih terukur dan sinergis.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengakselerasi upaya pencapaian visi misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi Pemerintah Daerah. Dalam kurun waktu tiga tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar. Perlu digaris bawahi pula

berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah.

Beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar sampai pada akhir Pembangunan Jangka Menengah (PJM) yaitu tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan PDLT, KIPT, KEK dan Gerbang Sari yang menjadi prioritas utama pencapaian visi dan misi bupati terpilih.
2. SDM Pelaku IKM untuk melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat masih redah.
3. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perikanan dan pengembangan IKM belum optimal.
4. Akses pelaku IKM terhadap layanan perbankan masih rendah.
5. Kompetensi tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan
6. Masih kurangnya aparatur berkompotensi K3.
7. Pemanfaatan dan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) belum optimal
8. Kondisi Pencari Kerja mengalami kesulitan mengakses informasi mengenai kesesuaian keahlian pekerja dengan kebutuhan perusahaan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. ***Adapun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah di uraikan dalam Lampiran 4.***

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.

Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing - masing SKPD yang dibawa ke Forum Organisasi Perangkat Daerah.

Renja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan

dari masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan dinas/instansi terkait pada Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian ditelaah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain urgen tidaknya, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi yang ada dapat terserap demi penyempurnaan Renja yang diharapkan akan memberikan output seperti yang diharapkan semua pihak.

Sebagian besar dapat diakomodir dikarenakan usulan tersebut memang benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dan ada usulan yang tidak dapat diakomodir dikarenakan berbagai hal antara lain keterbatasan penyediaan dana. Selain usulan kegiatan dari APBD kabupaten, juga mengusulkan kegiatan untuk memperoleh dana dari APBD provinsi dan APBN. Berdasarkan hasil musrembang untuk Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan belum ada usulan dari masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam Lampiran 5

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan penjabarannya dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun kebijakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional. Arah Kebijakan pembangunan nasional mengacu pada :

3.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021- 2026

Dapat diidentifikasi bahwa Kontribusi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam pencapaian Visi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 berada pada Bidang Perindustrian pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu kepada Misi ke-4 mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman. Adapun sasarannya untuk meningkatkan usaha pariwisata sedangkan untuk Bidang Ketenagakerjaan Pelaksanaan Program dan Kegiatannya mengacu kepada Misi Ke 2 Pembangunan Daerah yakni Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pedesaan. Tujuannya untuk

meningkatkan keberdayaan masyarakat. Adapun sasarannya mengarah kepada Sasaran Ketiga: Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan.

3.1.2. Telaahan Kementerian Pan RB

Sesuai dengan arahan dari Menteri PPN/Bappenas maka untuk penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga maka Visi Kementerian PANRB yaitu sebagai berikut:

“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”. Kementerian PANRB melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, yang dituangkan dalam misi Kementerian PANRB:

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.

5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.

6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.1
Permasalahan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan berdasarkan Sasaran Kementerian Pan RB

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenpan RB	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	1. Penyederhanaan pelayanan belum optimal dilakukan 2. Minimnya ASN yang professional 3. Sumberdaya Pelayanan publik masih terbatas	1. Keterbatasan sarana dan prasana pendukung 2. Diklat tatap muka belum bisa dilaksanakan selama masa Pandemi 3. Regulasi reformasi masih dilakukan secara bertahap	1. Pembenahan pelayanan yang responsive dilakukan secara bertahap 2. Tersedianya anggaran diklat pengembangan kompetensi ASN 3. Pemerintahan yang efektif dan Akuntabel termuat dalam regulasi Perda RPJMD 2021- 2026 4. Terbangunnya Mal Pelayanan Publik 5. Regulasi Reformasi Birokras
2.	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera			
3.	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel			
4.	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas			
5.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima			
6.	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional			

3.1.3. Telaahan Resntra Kementerian Perindustrian

Kementerian perindustrian Tahun 2020- 2024 telah meletakkan industri sebagai satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industry nasional secara terencana.

Adapun tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun kedepan yaitu meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional Adapun sasaran dan strategisnya adalah :

1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolah non migas.
2. Penguatan Implementasi *Making Indonesia*
3. Meningkatnya kemampuan industry dalam negeri.
4. Meningkatnya penguatan pasar industr.
5. Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah.
6. Meningkatnya persebaran Industri.
7. Tersedianya Regulasi pembangunan industri yang efektif.
8. Terselenggaranya urusan pemerintahan dibidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
9. Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efesien.
10. Terwujudnya ASN kementerian perindustrian yang professional dan berkepribadian.
11. Terwujudnya sistem informasi industri yan berkualitas.
12. Terwujudnya birokrasi efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.
13. Tersusunnya perencanaan program, pengelola keuangan,serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Bidang Perindustrian Kabupaten Kepulauan Selayar
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenprin	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas.	1. Investasi industri besar dan menengah belum ada	1. Belum maksimalnya kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta	1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	2. Usaha industri masih belum berkembang	2. Masih rendahnya Pertumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perindustrian	2. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008
3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri	3. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB masih sangat kecil	3. Masih Rendah kualitas produk IKM.	
4.	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	4. Kapasitas SDM penyuluh IKM untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat masih rendah	4. Perlunya pemutakhiran Data Potensi Industri yang Akurat setiap tahun.	
5.	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	5. Data pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) belum akurat	5. Perlunya Pembinaan Bagi Industri Rumah Tangga secara berkesinambungan.	
6.	Meningkatnya Persebaran Industri	6. Sosialisasi Perda RPIK Tahun 2019 belum dilakukan	6. Kurang lancarnya penyediaan bahan baku industri	
7.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	7. Penggunaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kab. Kepulauan Selayar belum efektif	1. Masih adanya tuntutan pasar terhadap standarisasi mutu produk Perindustrian	

3.1.4. Telaahan Renstra Perindustrian Provinsi

Pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2019-2023 yaitu Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.

Untuk tercapainya tujuan yang diharapkan, maka Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan teknologi dan inovasi industri
2. Tumbuh dan berkembangnya Sentra industri dan kawasan industri
3. Meningkatnya kapasitas teknologi, SDM dan sistem produksi
4. Tumbuh dan berkembangnya industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/kota serta hilirisasi sektor perindustrian

Tabel. 3.3

Permasalahan Pelayanan Bidang Perindustrian Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Propinsi	Permasalahan Pelayanan OPD Disperindag KUKM	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kemampuan teknologi dan inovasi industri	1. Pengembangan IKM di 11 Kecamatan yang berbasis sumberdaya lokal belum optimal	1. Masih rendahnya Pertumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perindustrian	1. Dukungan Peraturan Perundang-undangan disektor perindustrian
2.	Tumbuh dan berkembangnya Sentra industri dan kawasan industri	2. Sentra industri dan kawasan industri masih perlu dikembangkan bagi pemenuhan tuntutan pasar domestik dan global	2. Penetapan dan Pembebasan lahan masih perlu dipertegas	2. Ketersediaan SDA yang dapat mendukung pengembangan usaha disektor Perindustrian
3.	Meningkatnya kapasitas teknologi, SDM dan sistem produksi	3. kapasitas teknologi, SDM dan sistem produksi masih perlu ditingkatkan	4. Keterbatasan anggaran	3. Rencana Pembentukan sentra kuliner, koperasi berbasis pemberdayaan, penataan dan pemberdayaan masyarakat di 5 desa yang termasuk prioritas gerakan membangun desa mandiri
4.	Tumbuh dan berkembangnya industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/kota serta hilirisasi sektor perindustrian	4. kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta belum maksimal	5. Perlunya Pembinaan Bagi Industri Rumah Tangga secara berkesinambungan 6. Kurang lancarnya penyediaan bahan baku industri 7. Masih adanya tuntutan pasar terhadap standarisasi mutu produk Perindustrian	4. Tersedianya Road Map Kawasan Industri

3.1.5. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 tahun 2020 yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
5. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
6. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Tabel.3.4
Permasalahan Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Tenaga Kerja beserta Faktor

No	Sasaran jangka Menengah renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kompetensi tenaga kerja; 2. Tingkat produktivitas tenaga kerja masih rendah; 3. Rendahnya penyerapan tenaga kerja; 4. Rendahnya jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat masyarakat masih rendah dalam meningkatkan kompetensi; 2. Jumlah masyarakat penganggur masih tinggi; 3. Minimnya perusahaan yang ingin menerapkan peraturan perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) dan pemberina bantuan peralatan bagi alumni BLK; 2. Penyediaan layanan informasi pasarkerja dalam tahap pengembangan 3. Sosialisasi pentingnya penerapan

3.1.6. Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam RENSTRA 2018-2023 telah menyusun Program Prioritas yaitu Program Perluasan Dan Pengembangan Tenaga Kerja Beserta Kegiatannya Dan Didukung Oleh Program-Program Lain Diantaranya Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pembinaan Dan Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Program Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Dan Program- Program Administrasi Kantor.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran jangka Menengah renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1. Sistem informasi ketenagakerjaan belum tersedia;	1. Kurangnya pegawai yang menguasai Sistem informasi ketenagakerjaan;	1. Sistem Informasi ketenagakerjaan dalam proses penyusunan;

No	Sasaran jangka Menengah renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
2	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terciptanya lembaga pelatihan, lembaga pelayanan produktivitas dan transmigrasi serta mendorong terciptanya kesempatan kerja, pelayanan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja, terwujudnya informasi pasar kerja dan mendukung terlaksananya penempatan tenaga kerja	2. Minat masyarakat masih rendah untuk mengikuti pelatihan di BLK	2. Jenis Pelatihan BLK kurang memenuhi kebutuhan pasar kerja yang disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan	2. Tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK)
3	Tercapainya ketenangan bekerja dan berusaha, berkurangnya unjuk rasa dan mogok kerja, meningkatnya kualitas hidup pekerja, terwujudnya kebebasan berserikat, terlaksananya perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya pengembangan sistem jaminan sosial tenaga kerja	3. Belum banyak perusahaan di Kepulauan Selayar yang menerapkan peraturan perusahaan	3. Rendahnya minat pengusaha dalam membuat peraturan perusahaan dan perjanjian kerja	3. Program G-SMS mendorong peningkatan jumlah pekerjanya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan

Tabel 3.6 Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	10%	12%	15%	18%	20%	22%	22%
2	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	15 %	20%	25 %	30%	35%	40%	40%
3	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	30%	33%	40%	45%	60%	70%	70%
4	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan Terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	N/A	70%	73%	75%	77%	80%	80%
6	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,40%	0,40%	1,17%	2,00%	3,42%	5,85%	5,85%
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	12,50%	19,84%	25,00%	31,50%	39,69%	50%	50%
8	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0,30%	0,60%	0,90%	1,17%	1,50%	1,80%	1,80%

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan didasarkan pada rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra dan penyelarasan sasaran kinerja renstra dan Rencana Pembangunan Daerah atau RPD. Untuk rencana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 terdapat dalam lampiran 6 dokumen ini, Sedangkan tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
Misi I : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat - Meningkatnya nilai SAKIP - Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik - Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil - Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kedisiplinan dan kapasitas sumber daya aparatur - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Misi II : Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapasitas sdm dan fasilitas perekonomian perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja - Meningkatnya kualitas hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja -Meningkatkan upaya penyebarluasan dan informasi kesempatan kerja melalui penyebarluasan informasi kerja. -Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja melalui fasilitasi rekrutmen tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja pada perusahaan terkait antar Daerah, luar negeri maupun sektor kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengarahkan Perusahaan untuk Menyusun rencana tenaga kerja , desa. Pengembangan standar kompetensi tenaga kerja yang mengacu standar kebutuhan industri/ perusahaan, pengembangan kurikulum, penyediaan instruktur yang kompeten dan penyediaan informasi kerja, Penyediaan Informasi pasar kerja Online , Peningkatan perluasan dan melalui Antar daerah dan luar negeri serta mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru, Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) Melalui Proram G-SMS
Misi Ke IV : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan usaha pariwisata	Meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan Penggunaan Produk dalam Negeri -Meningkatkan sistem jaringaninformasi perdagangan (SIINAS) -Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 	

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memperhatikan rancangan awal RKPD dan pagu indikatif tahun 2024 dalam Renstra, namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang belum bisa diakomodir karena keterbatasan dana/pagu indikatif yang sudah ditetapkan.

3.3.1. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Adapun faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik yang menjadi skala prioritas

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari tujuan Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan, maka ditetapkan proyeksi belanja sesuai prioritas Pembangunan Daerah dalam Ranwal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian laporan kinerja keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITANN DENGGAN PELAYANAN DASAR	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase kegiatan yang mengacu pada RTK (%)
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan industri
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penerbitan izin usaha industri (IUI) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi (%) Tingkat Produktifitas Tenaga kerja
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tercapainya pelatihan berdasarkan unit kompetensi
Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n
Konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	Persentasenya terlaksananya konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil
Pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktifitas
Pengukuran Produktivitas tingkat daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah
Pengukuran kompetensi dan produktifitas tenaga kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelayanan antar kerja di daerah kab/kota
Penyediaan sumberdaya pelayanan antarkerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi
Pelayanan antarkerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL
Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
Penyelenggaraan Unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / kota	Persentase terlaksananya perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota
Peningkatan Perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) / Pekerja migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI / PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya
Pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola perusahaan yang layak
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjabersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kab/kota
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi/FGD tata cara pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang terlaksana
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah program pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentasi Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)
Penertiban Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan usaha industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Izin Usaha Industri yang Dikeluarkan
Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam system Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis system Informasi Industri nasional (SIINAS)	Persentase Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Usaha Industri
Program Pengelolaan sistem Informasi Industri nasional	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyediaan informasi industry untuk informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitas pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industry Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan menyesuaikan RPJMD serta Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar disesuaikan dengan pagu indikatif yang disetujui dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, penjabaran usulan program dapat dilihat pada lampiran 5.

Program Prioritas Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Mendukung 3 Pilar Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

4.1.1 Bidang Perindustrian :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan :

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

2. Program Pengendalian Izin usaha Industri

Kegiatan :

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional
Kegiatan :
 - a. Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/ Kota

4.1.2 Bidang ketenagakerjaan :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - b. Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil
 - c. Pengukuran produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penempatan Tenaga kerja
Kegiatan :
 - a. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota
 - b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - d. Perlindungan PMI (Pra dan purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota
 - e. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam Satu Kabupaten/Kota

3. Program Hubungan Industrial

Kegiatan :

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1(satu) Daerah kabupaten / Kota
- b. Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten / Kota

4. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

4.1.3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Untuk lebih Jelasnya, Rencana program , Kegiatan , Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif diuraikan pada lampiran 1

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan, forum OPD hingga Musrenbang tingkat Pemerintah Daerah.

Rekomendasi Perumusan Program dan Kegiatan adalah :

1. Setiap program dan kegiatan baik usulan dari masyarakat hasil musrembang maupun usulan OPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah.
2. Pengembangan usaha di tiap sektor harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Pelaksanaan program/kegiatan menekankan pada asas keadilan dan pemerataan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi disparitas kesejahteraan.
4. Monitoring dan evaluasi senantiasa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur baik di internal OPD, antar OPD dengan masyarakat/kelompok masyarakat penerima manfaat.

5.2. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah Pelaksanaan Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan

daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan disertai komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan karena sangat diperlukan dalam mensukseskan rencana kerja ini.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan. Rencana kerja terealisasi dalam rencana tindak lanjut yang dapat dilihat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai acuan dalam melaksanakan program-program yang disetujui dalam usulan rencana kerja ini.

Rencana tindak lanjut mutlak diperlukan, sehingga masing-masing bidang dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan

pembangunan yang telah direncanakan. Oleh karena itu adanya rencana tindak lanjut ini diharapkan mampu menjadi pedoman setiap bidang dalam melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Meskipun dalam dokumen rencana tersebut pelaksanaan kegiatan masih belum sempurna dan belum mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Demikianlah dokumen rencana kerja ini disusun, semoga setiap rencana yang telah disusun dapat terealisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Benteng, 2023

KEPALA DINAS

Hj. ANDI ROS IRMA, S. Sos

**Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP.19701001 199203 2 013**

LAMPIRAN

Lampiran 1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SELAYAR
PERIODE 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
reformasi birokrasi perangkat daerah				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0	0	B		BB		BB		A		A			
	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah			Nilai Sakit Perangkat Daerah	0	0	B		BB		BB		A		74,06			
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	0	0	B		BB		BB		A		85			
				Laporan Keuangan OPD sesuai standar akuntansi pemerintah	0	0	B		BB		BB		A		sesuai			
		3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	50.91	63.03	6,288,450,000	70.28	6,374,538,881	70.53	3,025,897,105	71.51	3,098,488,377	72.31	3,127,418,310	72.31	21,914,792,673	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79.35	83		85		88		91		95		95		
		3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.53	75	43,000,000	80	43,000,000	85	87,000,000	90	87,000,000	95	87,000,000	95	347,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	5,000,000	2	5,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	10	85,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	6,000,000	1	6,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	42,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	6,000,000	1	6,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	42,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	6,000,000	1	6,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	42,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	6,000,000	1	6,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	0	10,000,000	4	42,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	6,000,000	1	6,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	42,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4	8,000,000	4	8,000,000	4	12,000,000	4	12,000,000	4	12,000,000	20	52,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	100	21,000,000	100	2,837,088,882	100	1,651,000,000	100	1,651,000,000	100	1,651,000,000	100	7,811,088,882	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	0	0	360	2,816,088,882	360	1,610,000,000	360	1,610,000,000	360	1,610,000,000	1440	7,646,088,882	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SELAYAR
PERIODE 2021-2026

		0.00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	14	14	6,000,000	14	6,000,000	14	11,000,000	14	11,000,000	14	11,000,000	70	45,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	12	5,000,000	12	5,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	60	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	170,000,000	100	170,000,000	100	140,000,000	100	140,000,000	100	140,000,000	100	760,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	50	30,000,000	50	30,000,000	50	0	50	0	50	0	250	60,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	12	55,000,000	12	55,000,000	12	55,000,000	12	55,000,000	12	55,000,000	60	275,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	3	55,000,000	4	55,000,000	4	55,000,000	4	55,000,000	4	55,000,000	19	275,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	20	15,000,000	20	15,000,000	20	15,000,000	20	15,000,000	20	15,000,000	100	75,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	25	75,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Operasional Perkantoran	100	100	750,450,000	100	750,450,000	100	547,897,105	100	620,488,377	100	620,488,377	100	3,289,773,859	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	15	500,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	8	50,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	40	250,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
		0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	3	20,000,000	3	20,000,000	3	0	3	0	3	0	15	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SELAYAR
PERIODE 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1	485,450,000	1	485,450,000	1	302,897,105	1	375,488,377	1	375,488,377	5	2,024,773,859	Disperinnaker
		0.00.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	75,000,000	Disperinnaker
		0.00.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	5	150,000,000	Disperinnaker
		3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100	100	1,400,000,000	100	1,700,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	4,150,000,000	Disperinnaker
		0.00.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	300,000,000	1	300,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	900,000,000	Disperinnaker
		0.00.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	100,000,000	2	300,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	6	550,000,000	Disperinnaker
		0.00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	75	100,000,000	25	300,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	115	550,000,000	Disperinnaker
		0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	500,000,000	3	400,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	10	1,050,000,000	Disperinnaker
		0.00.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	200,000,000	2	200,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	7	550,000,000	Disperinnaker
		0.00.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	15	200,000,000	15	200,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	45	550,000,000	Disperinnaker
		3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3,404,000,000	100	573,999,999	100	100,000,000	100	100,000,000	100	128,929,933	100	4,306,929,932	Disperinnaker
		0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	Disperinnaker
		0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	304,000,000	12	473,999,999	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	60	927,999,999	Disperinnaker
		0.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	3,000,000,000	1	0	1	0	1	0	1	28,929,933	5	3,028,929,933	Disperinnaker
		0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	350,000,000	Disperinnaker

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SELAYAR
PERIODE 2021-2026

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		(13)
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100	100	500,000,000	100	300,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	1,250,000,000	Disperinnaker
		0.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	350,000,000	Disperinnaker
		0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	10	200,000,000	10	100,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	29	450,000,000	Disperinnaker
		0.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	200,000,000	2	100,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	7	450,000,000	Disperinnaker
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia				Rasio Kesempatan Kerja	0	0		B		BB		BB		A		0,99		
	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenagakerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	-	0		B		BB		BB		A		8		
				Tingkat Produktivitas tenaga kerja	-	0		B		BB		BB		A		65		
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang mengacu pada RTK	0	70	20,000,000	73	20,273,800	75	20,781,253	77	21,279,795	80	21,787,530	80	104,122,378	Disperinnaker
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	persentase terlaksananya Kegiatan yang mengacu pada RTK	0	100	20,000,000	100	20,273,800	100	20,781,253	100	21,279,795	100	21,787,530	100	104,122,378	Disperinnaker
		2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	Disperinnaker
		2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro (Perusahaan)	20	25	20,000,000	30	20,273,800	35	20,781,253	35	21,279,795	40	21,787,530	165	104,122,378	Disperinnaker
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.4	0.4	580,000,000	1.17	587,940,200	1.5	602,656,343	2	617,114,069	2.5	631,838,411	2.5	3,019,549,023	Disperinnaker
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase terlaksananya Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100	100	500,000,000	100	507,940,200	100	522,656,343	100	537,114,069	100	551,838,411	100	2,619,549,023	Disperinnaker
		2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkanKlaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	80	48	100,000,000	48	100,000,000	48	100,000,000	48	100,000,000	48	100,000,000	240	500,000,000	Disperinnaker
		2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	22	12	400,000,000	12	407,940,200	12	422,656,343	12	437,114,069	12	451,838,411	60	2,119,549,023	Disperinnaker

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SELAYAR
PERIODE 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)						
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		
		2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan KerjaKabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan SaranaPelatihan Kerja (Unit)	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	60	0	0	Disperinnaker	
		2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	persentase terlaksana konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	150,000,000	0	0	Disperinnaker
		2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepadaPerusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang MendapatKonsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	0	16	30,000,000	16	30,000,000	16	30,000,000	16	30,000,000	16	30,000,000	80	150,000,000	0	0	Disperinnaker
		2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	250,000,000	0	0	Disperinnaker
		2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah (Dokumen)	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000	0	0	Disperinnaker
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PersentaseTenaga Kerja yang Ditempatkan	12.5	19.84	166,000,000	25	168,272,540	31.5	172,484,402	39.69	176,622,302	50	180,836,511	50	864,215,755	0	0	Disperinnaker
		2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase terlaksana pelayanan antar kerja di daerah kab/kota	0	100	80,000,000	100	70,000,000	100	55,000,000	100	71,622,302	100	70,836,511	100	347,458,813	0	0	Disperinnaker
		2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	2	2	25,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	20,000,000	2	19,836,511	10	124,836,511	0	0	Disperinnaker
		2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan MelaluiLayanan AKAD dan AKL (Orang)	20	50	20,000,000	185	0	200	25,000,000	225	0	250	30,000,000	910	75,000,000	0	0	Disperinnaker
		2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi PencariKerja	Jumlah Pencari Kerja yang MendapatkanPenyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	250	0	0	Disperinnaker	
		2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan DisabilitasKetenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yangMendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	0	1	35,000,000	1	40,000,000	1	0	1	30,000,000	1	0	5	105,000,000	0	0	Disperinnaker
		2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	0	50	0	50	0	50	0	50	21,622,302	50	21,000,000	250	42,622,302	0	0	Disperinnaker
		2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase terlaksananya penerbitan izin LPTSK	0	100	0	100	25,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000	100	25,000,000	100	105,000,000	0	0	Disperinnaker
		2.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKSecara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	0	1	0	1	25,000,000	1	0	1	30,000,000	1	0	5	55,000,000	0	0	Disperinnaker
		2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yangBerlaku (Lembaga)	0	1	0	1	0	1	25,000,000	1	0	1	25,000,000	5	50,000,000	0	0	Disperinnaker

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SELAYAR
PERIODE 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja	100	100	20,000,000	100	48,272,540	100	44,484,402	100	50,000,000	100	25,000,000	100	187,756,942	
		2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihilangkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	0	1	20,000,000	1	25,000,000	1	19,484,402	1	25,000,000	1	25,000,000	5	114,484,402	Disperinnaker
		2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	0	5	0	5	0	5	25,000,000	5	0	5	0	25	25,000,000	Disperinnaker
		2.07.04.2.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja (Orang)	0	50	0	50	23,272,540	50	0	50	25,000,000	50	0	250	48,272,540	Disperinnaker
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota yang dilindungi	100	100	25,000,000	100	25,000,000	100	23,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000	100	128,000,000	Disperinnaker
		2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	2	25,000,000	25	25,000,000	25	23,000,000	25	25,000,000	25	30,000,000	102	128,000,000	Disperinnaker
		2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	0	Disperinnaker
		2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	0	Disperinnaker
		2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota	0	100	41,000,000	100	0	100	25,000,000	100	0	100	30,000,000	100	96,000,000	Disperinnaker
		2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (Satu) daerah (Laporan)	0	1	41,000,000	1	0	1	25,000,000	1	0	1	30,000,000	5	96,000,000	Disperinnaker
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	0.3	0.6	83,777,000	0.9	84,923,907	1.17	87,049,553	1.5	89,137,871	1.8	91,264,701	1.8	436,153,032	Disperinnaker
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	100	100	53,777,000	100	54,923,907	100	57,049,553	100	59,137,871	100	61,264,701	100	286,153,032	Disperinnaker
		2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar diWLKP Online (Perusahaan)	5	10	20,000,000	15	25,000,000	20	25,000,000	25	25,000,000	30	25,000,000	100	120,000,000	Disperinnaker
		2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	25	0	Disperinnaker

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SELAYAR
PERIODE 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)			Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			
						(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	16367	18000	33,777,000	6666	29,923,907	6666	32,049,553	6666	34,137,871	6666	36,264,701	44664	166,153,032	Disperinnaker
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang terlaksana	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	150,000,000	Disperinnaker
		2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	0	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	5	150,000,000	Disperinnaker
		2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselasaikan (Perkara)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	Disperinnaker
		2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	Disperinnaker
		2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	Disperinnaker
		2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	0	Disperinnaker
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha				Persentase Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	0	0	10,334,607,000	B	10,476,087,770	BB	7,230,107,763	BB	7,403,558,047	A	7,535,206,944	2,98	42,979,567,524	Disperinnaker
	Meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha			Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah	-	0	10,334,607,000	B	10,476,087,770	BB	7,230,107,763	BB	7,403,558,047	A	7,535,206,944	1500	42,979,567,524	Disperinnaker
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	10	12	3,196,380,000	15	3,140,138,442	18	3,218,736,107	20	3,295,953,587	22	3,374,595,039	22	16,225,803,175	Disperinnaker
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	100	100	3,196,380,000	100	3,140,138,442	100	3,218,736,107	100	3,295,953,587	100	3,374,595,039	100	16,225,803,175	Disperinnaker

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SELAYAR
PERIODE 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	11	11	450,000,000	11	450,000,000	11	453,200,000	11	461,400,000	11	467,000,000	55	2,281,600,000	Disperinnaker
		3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	11	11	296,380,000	11	240,138,442	11	300,136,107	11	336,653,587	11	383,395,039	55	1,556,703,175	Disperinnaker
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	16	16	450,000,000	16	450,000,000	16	453,300,000	16	461,400,000	16	467,000,000	80	2,281,700,000	Disperinnaker
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	0	100	900,000,000	100	900,000,000	100	905,300,000	100	911,200,000	100	919,200,000	500	4,535,700,000	Disperinnaker
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1	600,000,000	1	600,000,000	1	603,300,000	1	613,300,000	1	620,000,000	5	3,036,600,000	Disperinnaker
		3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	4	4	500,000,000	4	500,000,000	4	503,500,000	4	512,000,000	4	518,000,000	20	2,533,500,000	Disperinnaker
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	15	20	0	25	50,000,000	30	51,251,500	35	52,481,023	40	53,733,221	40	207,465,744	Disperinnaker
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Terlaksananya penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IUI), izin perluasan kawasan industri kewenangan kab/kota berbasis SIINAS	100	0	0	100	50,000,000	100	51,251,500	100	52,481,023	100	53,733,221	100	207,465,744	Disperinnaker
		3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (Dokumen)	55	0	0	55	30,000,000	55	30,651,500	55	31,181,023	55	31,733,221	220	123,565,744	Disperinnaker

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SELAYAR
PERIODE 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)						
						(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)			(12)	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)								
		3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	55	0	0	55	20,000,000	55	20,600,000	55	21,300,000	55	22,000,000	220	83,900,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN		
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	30	33	0	40	50,000,000	45	51,251,500	60	52,481,023	70	53,733,221	70	207,465,744	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN		
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyediaan informasi industri untuk industri untuk IUI, IPUI, IUKI, IPKI kewenangan kab/kota	0	100	0	100	50,000,000	100	51,251,500	100	52,481,023	100	53,733,221	100	207,465,744	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN		
		3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	0	1	0	1	15,000,000	1	15,351,500	1	15,681,023	1	16,033,221	5	62,065,744	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN		
		3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	1	1	0	1	15,000,000	1	15,400,000	1	15,800,000	1	16,000,000	5	62,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN		
		3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	0	1	0	1	20,000,000	1	20,500,000	1	21,000,000	1	21,700,000	5	83,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN		
Total								10,334,607,000		10,476,087,770		7,230,107,763		7,403,558,047		7,535,206,944		42,979,567,524		

**Lampiran2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2		Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan pelayanan dasar									
07		Urusan Pemerintahan Bidang TenagaKerja									
	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivas Tenaga Kerja	Presentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)	0,40%	0,40%	0,40 %	2,28%	5,7%	1,17%	3,85%	962,5%
		2 01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase terlaksananya Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	persentase terlaksana konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang MendapatKonsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	16 kali	n/a	16 kali	16 kali	100%	16 kali	32 kali	n/a	
	05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%	
	'04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	19,84%	12,50%	19,84%	39,06%	196,88%	25%	49,95%	251,76%	
	2 01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	2 layanan	2 layanan	2 layanan	2 layanan	100%	2 layanan	6 layanan	300%
		02	Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan MelaluiLayanan AKAD dan AKL (Orang)	50 orang	20 orang	50 orang	265 orang	530%	80 orang	365 orang	730%
		03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang MendapatkanPenyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	1 layanan	n/a	1 layanan	n/a	n/a	1 layanan	n/a	n/a
	05 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100%	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2 orang	n/a	2 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
		02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	0,60%	0,30%	0,60%	379 badan usaha	n/a	0,90%	n/a	n/a
07	05	2	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksannya pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar diWLKP Online (Perusahaan)	10 perusahaan	5 perusahaan	10 perusahaan	379 badan usaha	37,90%	15 perusahaan	399	39,90%
02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagiPerusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun PerjanjianKerja Bersama (Perusahaan)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	18.000 orang	16.367 Orang	18.000 orang	n/a	n/a	20.000 orang	n/a	n/a

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	1 kali	1 kali	1 kali	2 kali	200%	1 kali	4kali	400%
	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2 program	2 program	2 program (6000 orang)	2 program	n/a	n/a	n/a	n/a
3		Urusan Pemerintahan Pilihan									
31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga	12%	10%	12%	n/a	n/a	15%	n/a	n/a
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	1 kali	n/a	11 Dokumen	n/a	n/a
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	20%	n/a	20%	18,75%	93,75%	25%	43,75%	1,75%

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
		2 01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Terlaksananya penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI) Izin perluasan kawasan industri kewenangan kab/kota berbasis SIINAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (Dokumen)	55 IKM	55 IKM	55 IKM	55 IKM	100%	55 IKM	165	300%
04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi Nasional	33%	30%	33%	n/a	n/a	45%	n/a	n/a

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		2 01	Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Terlaksananya penerbitan izin usaha industri (UI), izin perluasan usaha industri (IPUI) Izin perluasan kawasan industri kewenangan kab/kota berbasis SIINAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAs) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINAs yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (Dokumen)	55 IKM	55 IKM	100%	55 IKM	165	300%

Lampiran 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
.	Ketenaga kerjaan											
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,40	1,17	1,50	2,00	2,28	n/a	1,50	2,00	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan yang ditempatkan	19,84	25,00	31,50	39,69	n/a	n/a	31,50	39,69	

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kepulauan Selayar**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	0,60%	0,90%	1,17%	1,50%	379 badan usaha	n/a	1,17%	1,50%	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga	12	15%	20%	22%	n/a	n/a	20%	22%	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	20%	25%	30%	35%	18,75%	n/a	30%	35%	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi Nasional	33%	40%	45%	60%	n/a	n/a	45%	60%	

Lampiran 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Benteng	persentase Capaian Kinerja (%)	88,00%	3,025,897,105	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Benteng	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Persentase Capaian Kinerja	88,00 % 70,53 %	3,025,897,105	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,53%	87,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,53%	87,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	25,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	25,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan	1 laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan	1 laporan	10,000,000	

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Evaluasi Kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	12.000.000	Evaluasi Kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	15.000.000	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Benteng	Presentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)	1,50	602,656,343	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Benteng	Presentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)	2,00	602.656.343	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase terlaksananya Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100%	522,656,343	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase terlaksananya Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100%	522,656,343	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	48orang	100.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	48orang	100.000.000	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	12	422,656,343	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	12	422,656,343	
	Pengadaan Sarana Pelatihan KerjaKabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan SaranaPelatihan Kerja (Unit)	12		Pengadaan Sarana Pelatihan KerjaKabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan SaranaPelatihan Kerja (Unit)	12		
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		persentase terlaksanya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	100%	30.000.000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		persentase terlaksanya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	100%	30.000.000	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil yang dilakukan	16 kali	30.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil yang dilakukan	15 kali	30.000.000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		persentase terlaksanya pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota	100%	50.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		persentase terlaksanya pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota	100%	50.000.000	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	50.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah (Dokumen)		50.000.000	

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Benteng	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	31,50%	172,484,402	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Benteng	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	31,50%	172.484.402	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		persentase terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah kab/kota pelayanan antarkerja	100%	55.000.000	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		persentase terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah kab/kota	100%	55.000.000	
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	2 layanan	30.000.000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	2 layanan	30.000.000	
	Pelayanan antar kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	200 orang	25.000.000	Pelayanan antar kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	200 orang	25.000.000	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang) kerja	50 orang	n/a	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	50 Orang	n/a	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	1 layanan	n/a	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	1 layanan	25.000.000	
	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah BU/Perusahaan/Instansi yang menciptakan kesempatan kerja baru	BU/Perusahaan/instansi	n/a	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah BU/Perusahaan/Instansi yang menciptakan kesempatan kerja baru	20 orang	25.000.000	
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		persentase terlaksananya penerbitan izin LPTSK	100%	25.000.000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		persentase terlaksananya penerbitan izin LPTSK	100%	25.000.000	
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi		Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	1		Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi		Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	1		

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	1	25.000.000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	1	25.000.000	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		persentase terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja	100%	44,484,402	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		persentase terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja	100%	44,484,402	
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	1	19,484,402	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	1	19,484,402	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	5	25,000,000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	5	25,000,000	
	Job Fair /Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja (Orang)	50	0	Job Fair /Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja (Orang)	50	0	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota yang dilindungi	100%	23.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota yang dilindungi	100%	23.000.000	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	25	23.0000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	25	23.0000.000	

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2		
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia PurnaPenempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia PurnaPenempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2		
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota	100%	25.000.000	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota	100%	25.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (Satu) daerah (Laporan)	1	25.0000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (Satu) daerah (Laporan)	1	25.0000.000	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	1,17%	87.049.553	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	1,17	87.049.553	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	100%	57,049,553	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	100%	57,049,553	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar diWLKP Online (Perusahaan)	20 Perusahaan	25,000,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar diWLKP Online (Perusahaan)	20 Perusahaan	25,000,000	
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagiPerusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun PerjanjianKerja Bersama (Perusahaan)	5	0	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagiPerusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun PerjanjianKerja Bersama (Perusahaan)	5	0	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	6666	32,049,553	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	6666	32,049,553	

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	6666	32,049,553	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	6666	32,049,553	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang terlaksana	100	30,000,000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang terlaksana	100	30,000,000	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	1	30,000,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	1	30,000,000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	1	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	1	0	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	1	0	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	1	0	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	0	

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1,651,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1,651,000,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	1,610,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30/bln	1,610,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	10,000,000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	10,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14	11,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14	11,000,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	10,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	10,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	135.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	135.000.000	

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	10.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	10.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	75.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	50.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	15,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	15,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	100%	547,897,105	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	100%	547,897,105	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	100,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	100,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	50,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	50,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1	50,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1	50,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	302,897,105	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	302,897,105	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kelancaran Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100	350,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kelancaran Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100	350,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	100,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	100,000,000	

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	50,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	50,000,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	50,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	50,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	50,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	50,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	50,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	50,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	100%	100,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	100%	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	50.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah	100%	1500000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah	100%	450.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	50.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	50.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	50.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.000.000	

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga	18%	3,218,736,107	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga	18%	3,218,736,107	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	100%	3.218.736.107	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri dievaluasi	n/a	3.218.736.107	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	11	453,200,000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	11	453,200,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	11	300,136,107	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	11	300,136,107	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	16	453,300,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	16	453,300,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	100	905,300,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	100	905,300,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	603,300,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	603,300,000	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	4	503,500,000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	4	503,500,000	
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	30%	51.251.500	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	30%	10.000.000	

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI) Izin perluasan kawasan industri kewenangan kab/kota berbasis SIINAS	100	51,251,500	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI) Izin perluasan kawasan industri kewenangan kab/kota berbasis SIINAS	100	51,251,500	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (Dokumen)	55	30,651,500	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (Dokumen)	55	30,651,500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	55	20,600,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	55	20,600,000	
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi Nasional	45%	51.251.500	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi Nasional	45%	51.251.500	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya penyediaan informasi industri untuk industri untuk IUI,IPUI,IUKI,IPKI kewenangan kab/kota	4 Izin	51.251.500	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya penyediaan informasi industri untuk industri untuk IUI,IPUI,IUKI,IPKI kewenangan kab/kota	5 Izin	10.000.000	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	15.351.500	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	15.351.500	

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	15.400.000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	15.400.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	20.500.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	20.500.000	

**Lampiran 5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah :Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No	Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2					-3	-4	-5	-6	-7
	2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKab/Kota	Benteng	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Persentase Capaian Kinerja	3,025,897,105	
				2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87,000,000	
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25,000,000	
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10,000,000	
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	10,000,000	
					04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10,000,000	
					05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10,000,000	
					06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan	10,000,000	
					07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15.000.000	
	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Benteng	Presentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)	602.656.343	

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah :Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No	Kode		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7
		2	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi		Persentase terlaksananya Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	522,656,343	
		01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	100,000,000	
		02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	422,656,343	
		3	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		persentase terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	30,000,000	
		01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	30,000,000	
		5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		persentase terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota	50,000,000	
		01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	50,000,000	
	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Benteng	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	172.484.402	
		01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		persentase terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah kab/kota	30,000,000	
		01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	25,000,000	
		02	Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	0	
		03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	0	
		04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	0	
		05	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	30,000,000	

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah :Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No	Kode				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2				-3	-4	-5	-6	-7
				02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		persentase terlaksananya penerbitan izin LPTSK	25,000,000	
				01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKSSecara Terintegrasi		Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	0	
				02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yangBerlaku (Lembaga)	25,000,000	
				03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		persentase terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja	48,272,540	
				01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	25,000,000	
				02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar KerjaOnline		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui SistemOnline (Karir Hub) (Orang)	0	
				03	Job Fair /Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang MendapatkanPekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja (Orang)	23,272,540	
				04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota yang dilindungi	23,000,000	
				01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	23,000,000	
				02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	0	
				03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia PurnaPenempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	0	

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah :Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No	Kode						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2						-3	-4	-5	-6	-7
						05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota	25,000,000	
						01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (Satu) daerah (Laporan)	25,000,000	
						05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Benteng	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	87,049,553	
						01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	57,049,553	
						01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar diWLKP Online (Perusahaan)	25,000,000	
						02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagiPerusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun PerjanjianKerja Bersama (Perusahaan)	0	
						03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	32,049,553	
						02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksanya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang terlaksana	30,000,000	
						01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	30,000,000	

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah :Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	0	
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	0	
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	0	
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	0	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Benteng			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,651,000,000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,610,000,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10,000,000	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	10,000,000	

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah :Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No	Kode						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2						-3	-4	-5	-6	-7
						07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	11,000,000	
						08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	10,000,000	
					05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	140,000,000		
						02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	
						05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	55,000,000	
						09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55,000,000	
						10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		
						11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50.000.000	
					05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	750,450,000		
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100,000,000	
						02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	50,000,000	
						05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50,000,000	
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	20,000,000	

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah :Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No	Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2					-3	-4	-5	-6	-7
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	302,897,105	
					10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	15,000,000	
					11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	30,000,000	
				07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	350,000,000	
					01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100,000,000	
					02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan		Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang)	50,000,000	
					05	Pengadaan Mebel		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50,000,000	
					06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	50,000,000	
					10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	50,000,000	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan (Unit)	200,000,000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	573,999,999	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat (Laporan)	0	

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah :Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No	Kode						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2						-3	-4	-5	-6	-7
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	473,999,999	
						03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100,000,000	
					09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	150,000,000	
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	50,000,000	
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50,000,000	
						10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50,000,000	
				02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kegiatan yang mengacu pada RTK	20,781,253	
					01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		persentase terlaksannya Kegiatan yang mengacu pada RTK	20,781,253	
						01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	
						02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro (Perusahaan)	20,781,253	

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah :Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No	Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2					-3	-4	-5	-6	-7
			02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	3,140,138,442	
					01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase terlaksana penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	3,140,138,442	
					01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	453,200,000	
					02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	300,136,107	
					03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	453,300,000	
					04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	905,300,000	
					05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	603,300,000	
					06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	503,500,000	

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah :Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No	Kode				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2				-3	-4	-5	-6	-7
			03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga	51,251,500	
				01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Terlaksananya penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI) Izin perluasan kawasan industri kewenangan kab/kota berbasis SIINAS	51,251,500	
				01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (Dokumen)	30,651,500	
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	20,600,000	
			04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Benteng	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi Nasional	51,251,500	
				01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya penyediaan informasi industri untuk industri untuk IUI,IPUI,IUKI,IPKI kewenangan kab/kota	51,251,500	
				01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	15,351,500	
				02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	15,400,000	
				03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	20,500,000	

**Lampiran 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN				7.230.107.765				7,403,558,047
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Persentase Capaian Kinerja	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	70,53% 88%	3,025,897,105	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		71.51% 91%	3,098,488,377
	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	87,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100%	87,000,000
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2Dokumen	25,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2Dokumen	25,000,000
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10,000,000
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10,000,000
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Dokumen	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10,000,000
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Dokuemn	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokuemn	10,000,000

**Lampiran 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	10,000,000
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	12,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4	12,000,000
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1,651,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	1,651,000,000
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		360	1,610,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		360	1,610,000,000
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	10,000,000
	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	10,000,000
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		14	11,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14	11,000,000
	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		12	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12	10,000,000

**Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	140,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	140,000,000
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan (Paket)		50	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50	0
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		12	55,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12	55,000,000
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		4	55,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4	55,000,000
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang)		20	15,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20	15,000,000
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		5	15,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5	15,000,000
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Operasional Perkantoran		100	547,897,105	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	620,488,377
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		3	100,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3	100,000,000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan (Paket)		8	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8	50,000,000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaanyang Disediakan (Paket)		1	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	50,000,000

**Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3	0
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	302,897,105	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	375,488,377
	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	15,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	15,000,000
	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	30,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	30,000,000
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	350,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	350,000,000
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1	100,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	100,000,000
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	50,000,000
	5	Pengadaan Mebel		5	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5	50,000,000
	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	50,000,000
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	50,000,000

**Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5	50,000,000
2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	100,000,000
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	0
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12	50,000,000
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	0
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	50,000,000
2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	150,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	150,000,000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	50,000,000
	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3	50,000,000
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	50,000,000

**Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang mengacu pada RTK		75	20,781,253	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		77	21,279,795
2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	persentase terlaksannya Kegiatan yang mengacu pada RTK		100	20,781,253	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	21,279,795
	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	0
	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro (Perusahaan)	35	20,781,253	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35	21,279,795
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		1.5	602,656,343	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2	617,114,069
2.02	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase terlaksananya Pelatihan berdasarkan unit kompetensi		100	522,656,343	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	537,114,069
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	48	100,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		48	100,000,000
	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	12	422,656,343	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12	437,114,069
	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	12	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12	0

**Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	persentase terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil		100	30,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	30,000,000
1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepadaPerusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang MendapatKonsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)		16	30,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16	30,000,000
2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota		100	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	50,000,000
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah (Dokumen)		1	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	50,000,000
04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PersentaseTenaga Kerja yang Ditempatkan		31.5	172,484,402	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50	180,836,511
2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah kab/kota		100	55,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	70,836,511
1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)		2	30,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2	19,836,511
2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan MelaluiLayanan AKAD dan AKL (Orang)		200	25,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		225	0
3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi PencariKerja	Jumlah Pencari Kerja yang MendapatkanPenyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)		50	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50	0
4	Penyelenggaraan Unit Layanan DisabilitasKetenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yangMendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)		1	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	30,000,000
5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)		50	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50	21,622,302

**Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase terlaksananya penerbitan izin LPTSK		100	25,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	30,000,000
1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKSecara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)		1	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	30,000,000
2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yangBerlaku (Lembaga)		1	25,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	0
2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja		100	44,484,402	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	50,000,000
1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)		1	19,484,402	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	25,000,000
2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar KerjaOnline	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui SistemOnline (Karir Hub) (Orang)		5	25,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5	0
3	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang MendapatkanPekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja (Orang)		50	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50	25,000,000
2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota yang dilindungi		100	23,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	25,000,000
1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)		25	23,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25	25,000,000
2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)		2	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2	0

**Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia PurnaPenempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2	0
2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota	100	25,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	0
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (Satu) daerah (Laporan)	1	25,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	0
05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	1.17	87,049,553	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.5	89,137,871
	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksannya pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	100	57,049,553	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	59,137,871
	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar diWLKP Online (Perusahaan)	20	25,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25	25,000,000
	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagiPerusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun PerjanjianKerja Bersama (Perusahaan)	5	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5	0
	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	6666	32,049,553	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6666	34,137,871

**Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang terlaksana		100	30,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	30,000,000
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)		1	30,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	30,000,000
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)		1	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	0
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)		1	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	0
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)		1	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	0
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)		2	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2	0

**Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja		18	3,218,736,107	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20	3,295,953,587
2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri		100	3,218,736,107	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	3,295,953,587
	1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)		11	453,200,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11	461,400,000
	2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)		11	300,136,107	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11	336,653,587
	3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)		16	453,300,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16	461,400,000
	4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)		100	905,300,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	911,200,000
	5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)		1	603,300,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	613,300,000
	6 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)		4	503,500,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4	512,000,000

**Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)		30	51,251,500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35	52,481,023
2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Terlaksananya penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI) Izin perluasan kawasan industri kewenangan kab/kota berbasis SIINAS		100	51,251,500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	52,481,023
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (Dokumen)		55	30,651,500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55	31,181,023
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dokumen)		55	20,600,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55	21,300,000
04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional		45	51,251,500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60	52,481,023

**Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyediaan informasi industri untuk industri untuk IUI,IPUI,IUKI,IPKI kewenangan kab/kota		100	51,251,500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100	52,481,023
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)		1	15,351,500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	15,681,023
2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)		1	15,400,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	15,800,000
3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)		1	20,500,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1	21,000,000